



Muncul Nama

Istri Wali Kota

dan Kapolsek

Dijanjikan Setoran Fee untuk HS 0,5 Persen

JOGJA, Radar Jogja - Uang suap lelang proyek rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) pada DPUPKP Kota Jogja diduga mengalir ke berbagai pihak. Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) kembali disebut. Kali ini juga istrinya Tri Kirana Muslidatun. Serta anggota DPRD Kota Jogja, kapolsek Umbulharjo hingga aktivis LSM.

Itu dikatakan saksi Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri Gabriella Yuan Anna Kusuma dalam sidang lanjutan dengan terdakwa Eka Safitra dan Satriawan Sulaksono di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi dan Hubungan Industrial, kemarin (22/1).

Pada persidangan, jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Yunarwanto sempat menanyakan terkait saran-saran dari Eka setelah Gabriella memilih beberapa list pekerjaan proyek yang ditawarkan Eka. Yang dipilih Gabriella proyek rehabilitasi SAH Soepomo Cs dengan pagu anggaran kurang lebih Rp 10 miliar. "Waktu itu kami diminta untuk membawa tiga perusahaan, supaya menang di harga terendah; tengah-tengah dan paling tinggi," jawab Gabriella.

Tapi perusahaan Gabriella tidak memenuhi kualifikasi yang dimaksud Eka pada proyek SAH ini. Yaitu proyek non kecil dan memiliki Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang disampaikan pada pertemuan

awal. Dari tiga perusahaan yang disarankan Eka, saksi Gabriella hanya membawa dua bendera perusahaan yakni PT Widoro Kandang dan PT Pakubumi Manunggal. "Iya ini punya (SMK3 yang disarankan Eka)," jawabnya.

Ada janji khusus, jika nomor tiga yang bisa dimenangkan maka ada fee tambahan setengah dari selisih tender dua dan tiga. Ternyata tidak bisa dikondisikan, sebab menurut keterangan dari Gabriella perusahaan nomor dua juga lengkap dengan persyaratan. "Nomor dua menurut Pak Eka agak susah karena perusahaan bawaan dari istri wali kota," jelasnya.

Perusahaan yang dimaksud merupakan bawaan dari Tri Kirana Muslidatun adalah PT Jaya Semanggi di Surabaya. "Bahkan perusahaan nomor dua itu juga diinformasikan (Eka) ingin membeli kemenangan dari Widoro Kandang," ucapnya.

Fakta-fakta lain yaitu terkait dengan pemberian fee di luar lima persen yang telah disepakati. Beberapa diantaranya yaitu fee kepada Kapolsek Umbulharjo sebesar Rp 10 juta bertujuan untuk penghentian arus lalu lintas di proyek SAH Soepomo Cs. Kemudian fee kepada LSM yang lupa disebutkan namanya dengan nilai Rp 5 juta untuk proposal permohonan acara kegiatan di kampungnya. Permintaan fee lain yaitu dari anggota DPRD Kota Jogja. Menurut Gabriella, ini untuk menaruh orang di proyek SAH Soepomo Cs. "Jadi dia menaruh orang seolah-olah ada orang yang bekerja di situ tapi orangnya tidak hadir," jelasnya.

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...

Berit
atif
itif
ral

ut
japi
ui



JADI PESAKITAN: Terdakwa Satriawan Sulaksono saat mendengarkan keterangan saksi, dalam lanjutan sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi dan Hubungan Industrial.

Fee lain lagi permintaan dari Kepala DPUP-KP Kota Jogja Agus Tri Haryono yaitu permintaan fee 0,5 persen untuk diberikan kepada wali Kota Jogja. Namun, fee ini belum sempat dialokasikan karena rencana akan dialokasikan pada saat pekerjaan tambahan proyek SAH Soepomo Co.

Sementara, JPU KPK, Wawan Yunarwanto mengatakan penemuan fakta-fakta baru sebelumnya pada Agus disambungkan dengan fakta keterangan dari Gabriella. Ketika perusahaan yang dibawanya menang memang disampaikan oleh Agus untuk menyerahkan fee sebesar 1,5 persen. Namun keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari DPUP-KP sebelumnya. Selain Agus juga Kabid Bina Marga, Umi Akhsanti. "Kami dalam dulu. Karena faktanya Ana (Gabriella) belum menyerahkan (fee 1,5 persen), hanya diminta untuk menyerahkan," kata Wawan di sela ishtoma sidang.

Wawan menjelaskan terkait keterangan fee 0,5 persen nanti akan diambilkan dari pekerjaan tambahan. Artinya menurut dia, dalam suatu proyek biasanya ada pekerjaan tambah kurang. "Semacam ijon, jadi misal memberikan atau dikasih duit dulu nanti dengan harapan dia (Gabriella) mendapat pekerjaan berikutnya se-

hingga dia dapat pemasukan lagi," tuturnya.

Terkait fakta ini dia pernah menanyakan kepada yang bersangkutan atau Agus itu sendiri tentang permintaan fee kepada pihak rekanan yang menang. "Tapi di sidang dia (pekan lalu) menerangkan tidak pernah meminta fee 0,5 persen, itu tidak ada," ucapnya menjelaskan keterangan Agus pada sidang pekan lalu. (wia/prs/f)

Ana Haryadi Akan Tuntut yang Memfitnahnya

TRI Kirana Muslidatun, atau akrab disapa Ana Haryadi, membantah keterangan Gabriella. Bahkan dia mengancam akan menuntut balik tuduhan kepadanya.

"Oya? Luar biasa demi Allah ini fitnah. Saya itu *ndak* pernah tahu proyek itu lho tendernya saja saya *ndak* tahu satu pun," tuturnya saat dikonfirmasi wartawan kemarin, (22/1).

Ana juga membantah bahwa perusahaan pemenang lelang kedua pada proyek rehabilitasi SAH itu merupakan bawaan darinya. Dia berdalih tidak pernah membawa perusahaan PT Jaya Semanggi itu pada proses lelang proyek SAH. "Enggak, enggak, saya nggak pernah membawa ataupun meminta. Nama PT itu (Jaya Semanggi) saya enggak tahu, kenalnya saya itu person," kata Ana ketika dihubungi wartawan, kemarin (22/1).

Dia menjelaskan tidak pernah terlibat sama sekali dalam upaya proyek SAH tersebut. Termasuk beberapa proyek yang berada di DPUPKP. Apalagi harus mengenal dengan nama perusahaan yang disebut Gabriella. Pun satu persatu orang-orang dari perusahaan tersebut sama sekali tidak ada yang dikenalnya. "Ini fitnah, saya tidak kenal tidak tahu sama sekali. Saya hanya kenal pengusaha Jogja," jelasnya.

Bahkan perusahaan menang nomor dua itu yang diinformasikan Gabriella dari terdakwa ES ingin membeli kemenangan dari Widodo Kandang juga dibantahnya.

Dia pun tidak pernah dikonfirmasi oleh penyidik KPK terkait perkara ini. Meski demikian, dia siap jika dibutuhkan untuk diminta keterangan sebagai saksi. "Saya siap, karena saya tidak tahu menahu satu pun tender-tendernya," tambahnya.

Dalam kesempatan ini, dia berstatement yang ditujukan kepada semua oknum



Karena keterangan Ana (Gabriella) konsisten dengan yang di BAP."

WAWAN YUNARWANTO
JPU KPK

dalam perkara ini agar tidak menyangkut pautkan politik dalam hal ini. Maksudnya yang memiliki tujuan lain untuk menjatuhkan dia bersama HS. Dia menyayangkan sekali jika kasus ini ditumpangi oleh kepentingan politik. "Saya enggak kenal dia (Gabriella) dan dia tidak kenal saya sama sekali. Saya akan menuntut dia (Gabriella) kalau nanti dia memfitnah," tegasnya.

Sedang Kapolsek Umbulharjo Kompol Alaal Prasetyo belum bisa dikonfirmasi. Telepon, SMS maupun *chatting* via *WhatsApp* yang dikirimkan Radar Jogja belum dibalas hingga tadi malam.

JPU KPK, Wawan Yunarwanto mengatakan terkait penyebutan istri Wali Kota sebenarnya sudah ada pada BAP sebelumnya. "Karena keterangan Ana (Gabriella) konsisten dengan yang di BAP," katanya.

Dia menyebut, terkait dengan fee yang diberikan kepada Kapolsek Umbulharjo sebesar Rp 10 juta pun yang ditujukan untuk pengaturan lalu lintas juga masih perlu pendalaman lagi. "Apakah itu digunakan benar untuk operasional atau saweran kan kami enggak tahu," jawabnya.

Kendati demikian, dia berharap kasus ini bisa menjadi pintu masuk membuka kasus perkara korupsi yang lain di DIJ. Tergantung dengan kecukupan bukti-bukti yang ada. "Kalau bukti cukup demi kebaikan (Jogja) apapun yang salah," tuturnya. (wia/pri/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Negatif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas PUPKP			

Yogyakarta, 23 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005